

Community Empowerment Program Based on Citizens (PMB-RW) in RumbaiPesisir District

By : Pujiyati

Email: pujiando19@gmail.com

Supervisor: Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

Implementation of this program starts by providing skills through training to the people who are targeted PMB-RW program. There are still many activities that have not been implemented in the PMB-RW program. In addition to the unfinished activities, activities that have been running was not optimal as planned. In addition, there are problems related to activities that should be prioritized. The activities that are carried out are still said to be activities that are not priority, due to the minimal budget. Not yet improve the social welfare of the economy and social that should be the objective of the PMB-RW Program in RumbaiPesisir District. Given the knowledge and skills in these various fields, it can be one of the capital for the community to create new jobs.

The research was conducted using qualitative descriptive research method. This study uses the concept of program empowerment by Sujianto namely: Independence, Participatory, Networking, Justice, Sustainability. This research is data collecting technique which is observation, interview, documentation and literature study by using descriptive analysis technique.

Community-based Community Empowerment (PMB-RW) Empowerment Program in RumbaiPesisir Sub-District has not been able to improve the economic, social, community, but the knowledge of the community who participated in the training has been obtained in the PMB-RW Program. Participation of escort personnel is already underway and has benefits for the running of the PMB-RW Program in planning and supervision. Public participation for the idea of activities has been running malaluimusyawah network in the form of information, coordination, and communication. However, fund participation is still limited by the Municipal Government so that planned activities can not run all. The factors that affect the Community Empowerment Program Based on Citizens (PMB-RW) in RumbaiPesisir District is Participation in the form of funds and personnel / ideas in the form of ideas and justice. Funds for the implementation of activities that will affect the implementation so that the participation of counselors and ideas ideas go according to the wishes of the community. So that justice takes place in the Program

Keywords: Empowerment, Program, Society

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir

Oleh : Pujiyati

Email: pujiando19@gmail.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRAK

Pelaksanaan program ini memulainya dengan memberikan skill melalui pelatihan kepada warga yang menjadi sasaran program PMB-RW. Masih banyak kegiatan yang belum terlaksana pada program PMB-RW. Selain belum terlaksananya kegiatan, kegiatan yang sudah berjalan pun belum optimal sesuai yang sudah direncanakan. Selain itu adanya masalah yang berkaitan dengan kegiatan yang harus diprioritaskan. Kegiatan yang terlaksana masih dikatakan sebagai kegiatan yang tidak prioritas, dikarenakan anggaran yang minim. Belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi tujuan dari Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir. Dengan adanya pengetahuan dan *skill* di berbagai bidang tersebut, dapat menjadi salah satu modal bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan oleh Sujianto yaitu: Kemandirian, Partisipatif, Jaringan kerja, Keadilan, Keberlanjutan. Penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial, masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah di dapatkan dalam Program PMB-RW. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat untuk ide kegiatan sudah berjalan melalui musyawarah jaringan kerja berupa informasi, koordinasi, dan komunikasi. Akan tetapi partisipasi dana masih terbatas yang dikeluarkan Pemerintah Kota sehingga kegiatan yang direncanakan tidak bisa berjalan semua.

Adapun faktor yang mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Program

Kata Kunci : Pemberdayaan, Program, Masyarakat

Pendahuluan

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung dari segi potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Maka dari itu dikeluarkan lah keputusan walikota dengan program PMB-RW.

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintah maupun bagi masyarakat, sehingga sumber informasi yang berkembang adalah bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.

Sumber informasi hasil regulasi maupun kearifan lokal tersebut adalah merupakan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*), hal ini merupakan proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaring dan menyajikan informasi dengan cara tertentu, sehingga para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan kondisi eksisting Kota Pekanbaru dari masa ke masa menjadi suatu bidang kajian yang spesifik, untuk kemudian menginstitutionalkannya menjadi pengetahuan lembaga pemberdayaan bagi kepentingan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membangun Kota Pekanbaru.

Selama ini banyak produk-produk hukum dan kearifan lokal yang ada masih merupakan *Tacit Knowledge* bagi pimpinan/lembaga tertentu yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga mimpi Walikota Pekanbaru yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak sampai kepada masyarakat.

Oleh Karena itu pemerintah/lembaga lain di Kota Pekanbaru harus mengambil langkah agar *Tacit Knowledge* tidak hanya difahami oleh pimpinan/lembaga di level-level tertentu, maka Pemerintah memberi peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan peran masyarakat di level Rukun Warga dari *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge* yang berperan sebagai media Komunikasi Pembangunan, artinya Perdalam hal ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 19 tahun 2012 tentang RPJMD dan Peraturan Daerah lainnya perlu diterjemahkan kedalam bentuk Program melalui pendekatan Pemberdayaan bersama-sama masyarakat Kota Pekanbaru.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan, solusi yang tepat adalah melalui Program PMB-RW Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW). PMB-RW mulai di laksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada

tahun 2014, akan tetapi pada Kecamatan Rumbai Pesisir baru adanya pengukuhan tenaga pendamping program PMB-RW pada Maret 2015. Sesuai dengan peraturan Walikota maka program PMB-RW tersebut mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2. Meningkatkan sosial kaum miskin
3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat
4. Pemberdayaan dan pembangunan kapasitas lokal

Sedangkan dari PMB-RW tersebut mempunyai lima strategi dasar untuk mencapai hasil dari implementasinya sendiri, lima strategi dasar tersebut yaitu:

1. Untuk penataan ruang kota
2. Melakukan pembenahan infrastruktur dasar
3. Penerapan pendekatan kota modern
4. Pengembangan kawasan perkotaan
5. Untuk pemberdayaan masyarakat

Rukun Warga merupakan pembagian wilayah di Indonesia di bawah Dusun atau Lingkungan. Rukun Warga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.

Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang teori program dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Hasil penelitian juga dapat menjadi literatur yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan instansi pemerintah yaitu kecamatan.

Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan atau solusi kepada pemerintah. Instansi terkait, dan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam upaya menetapkan dan melaksanakan PMB-RW.

Landasan Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Menurut **Sujianto (2009:15)** konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan secara dinamis mengembangkan diri mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat mengandung arti adanya upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan haruslah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat menurut **Aziz, dkk (2005:136)** merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang

kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-meneru, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Mardikanto (2013:161) menjelaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Pendekatan partisipatif, dalam arti dapat selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan orang luar atau penguasa, metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
2. Pendekatan kesejahteraan, dalam arti bahwa kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memebrikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin

keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (**Kartasmita dalam Mardikanto, 2013 : 163**). Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

1. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung pada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.
2. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikutsertakan masyarakat yang menajadi penerima manfaat mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga

lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu.

Sedangkan menurut **Usman (2003 :40)** ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menciptakansuasna atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.

2. Program

Menurut **Sujianto (2008:32)** program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Menurut **Charles O. Jones** dalam **Amalia (2009:295)** pengertian program adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program

- biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Metode Penelitian

Informan Penelitian

- a. Camat Rumbai Pesisir
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
- c. Rukun Warga
- d. Masyarakat

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis buat maka penelitian ini akan dilakukan pada Kecamatan Rumbai Pesisir Provinsi Riau.

Sumber Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi kepustakaan

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata..

Pembahasan

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

1. Kemandirian

Aspek pertama dalam teori Program Pemberdayaan Sujianto yaitu kemandirian, Kemandirian merupakan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak bergantung pada orang lain

Pada aspek pertama dalam teori tersebut memiliki sub-indikator yang terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Ekonomi

Pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir dalam pengamatan penulis yaitu belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat yang mengikutinya. sebentar saja. Kegiatan tersebut hanya berupa pelatihan dan pembangunan bersifat fisik.

Selain dalam hasil pengamatan penulis, penulis mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat saya rasa program PMB-RW belum berpengaruh terhadap itu. Karena PMB-RW ini kegiatannya hanya sekedar pelatihan dan pembangunan fisik. Sifat pelatihannya juga seperti kilat, hanya pelatihan tersebut berlangsung tidak sampai seminggu”. (Hasil wawancara dengan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

b. Sosial

Pada sub-indikator ini sosial dapat berarti kemasyarakatan. Pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir perubahan sosial masyarakat tidak begitu berpengaruh. Karena kegiatan dalam Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir menurut penulis hanya Program yang bersifat pembelajaran dasar. Program PMB-RW tersebut tidak meningkatkan taraf hidup manusia dari derajat kelas sosial dalam masyarakat. Karena pada dasarnya program tersebut memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya.

Berikut hasil wawancara untuk penegasan mengenai sub-indikator sosial tersebut :

“Program PMB-RW belum berpengaruh terhadap tingkat sosial masyarakat. Karena PMB-RW ini kegiatannya hanya sekedar pelatihan dan pembangunan fisik, jadi menurut saya kelas sosial masyarakat tidak berubah. bagaimana mau berubah kalau misalkan yang mengikutinya belum meningkatkan ekonomi”. (Hasil

wawancara dengan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir belum meningkatkan atau merubah sosial kehidupan masyarakat yang mengikuti kegiatan PMB-RW.

c. Intelektual

Dalam sub-indikator ini membahas apakah Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki dampak terhadap intelektual masyarakat yang mengikutinya.. Kegiatan pada program PMB-RW menurut penulis suatu kegiatan yang meningkatkan intelektual masyarakat yang mengikutinya. Selain menurut pendapat penulis, penulis dapat mewawancarai RW dan Masyarakat yang mengetahui bagaimana kegiatan tersebut.

“pengetahuan masyarakat yang mengikuti menurut saya bertambah, tapi masih belum bisa dipraktekkan dalam bekerja atau membuka usaha. Karena praktek yang masih kurang dan terlalu cepat. Pembelajarannya belum begitu dipahami lebih jela.”. (Hasil wawancara dengan RW di Kecamatan Rumbai Pesisir, 2 April 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir berpengaruh terhadap intelektual atau menambah pengetahuan masyarakat yang mengikutinya. Program PMB-RW tersebut menambah pengetahuan masyarakat sesuai kegiatan yang mereka ikuti.

2. Partisipatif

Merupakan gerakan warga untuk terlibat dalam proses pembangunan yang mengarah pada menuju perubahan kehidupan yang lebih baik. Pada teori kedua ini memiliki sub-indikator yaitu:

a. Manfaat

Pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir, partisipasi berguna atau bermanfaat untuk masyarakat agar meningkatkan kemandirian masyarakat yang dijelaskan pada indikator pertama yaitu meningkatkan perekonomian, sosial dan intelektual

Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara bersama Camat dan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir:

“sebenarnya Program PMB-RW kalau berjalan dengan baik sangat bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi sejauh ini kegitannya hanya pelatihan dasar dan belum didalami dari segi teori maupun praktek. Karena sangat minimnya dana anggaran untuk menjalankan program tersebut sehingga pelatihan hanya berlangsung sebentar saja. Tidak bisa memberikan pelatihan yang focus dan mendalam”.

(Hasil wawancara dengan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir mempunyai manfaat. Akan tetapi belum berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mengikutinya. Kemampuan yang dimiliki tidak bisa dilaksanakan sebagai mata pencaharian karena tidak memiliki modal.

b. Tenaga

Pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir

memiliki partisipasi tenaga pendamping. Tenaga pendamping memiliki tugas mendampingi setiap kelurahan dalam kegiatan PMB-RW.

Partisipasi tenaga pendamping sangat diperlukan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Camat:

“tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pun tenaga pendamping mempunyai tugas untuk mengawasi keberlangsungan kegiatan tersebut. Tenaga pendamping berasal dari sarjana dan diberikan honor.”

(Hasil wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir, 14 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir terlaksana dengan petunjuk teknis dan memiliki tenaga pendamping. Tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir. Untuk menentukan kegiatan yang harus di prioritaskan dan mengawasi berjalannya Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir.

c. Dana.

Selain dari dana Pemerintah Kota, bisa saja dana dari luar, seperti yang disampaikan Camat Rumbai Pesisir dalam hasil wawancara berikut:

“sumber dana Program PMB-RW sejauh ini masi menggunakan anggaran dari Pemerintah Kota. Tapi dalam juknisnya bisa saja bantuan dana dari luar, misalkan perusahaan-perusahaan swasta yang bertepatan di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. misalkan ada perusahaan yang berpartisipasi dan mau memberikan dana terhadap Program PMB-RW ini, ya pihak kecamatan menerima saja. ”. **(Hasil wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir,14 Juli 2017)**

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa dana untuk pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan dana yang di dapat dari Pemerintah Kota

d. Pikiran/Ide

Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada sub-indikator ini yaitu bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh.

berikut hasil wawancara penulis bersama masyarakat:

“sepertinya partisipasi masyarakat dalam bentuk ide tidak dilaksanakan. Hanya tertuang pada musyawarah. Kegiatan juga berjalan tiap tahunnya hanya itu-itulah saja. Tidak berinovasi dan kreatif”. **(Hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir,23 Mei 2017)**

“kalau saya malas berpartisipasi dengan kegiatan PMB-RW. Karena menurut saya sia-sia. Kegiatan yang berjalan itu saja, terus masyarakat yang ikut juga terbatas”. **(Hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir,23 Mei 2017)**

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ide tidak bersemangat. Hal tersebut karena menurut masyarakat ide tersebut tidak terlaksana, dan yang mengikut kegiatan juga terbatas dikarenakan anggaran yang sangat minim.

3. Jaringan Kerja

Bertujuan untuk melengkapi rancangan, menghemat biaya, waktu dan mempertinggi daya guna (efisiensi) kerja, baik manusia maupun peralatan serta menjamin ketepatan selesainya suatu program. Pencapaian jaringan kerja di dapat dari informasi, koordinasi dan komunikasi.

a. Informasi

Pada sub-indikator ini yaitu membahas mengenai informasi dalam jaringan kerja pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir. Informasi sebagai pesan sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan secara langsung pada program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Hal tersebut dijelaskan melalui penjelasan dari Kasi PMK dan Camat Rumbai Pesisir sebagai berikut:

“jelas sudah disosialisasikan dan di informasikan, program ini kan harus adanya partisipasi masyarakat, namanya juga Program Pemberdayaan di lingkungan masyarakat RW”.(Hasil wawancara dengan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa dalam Program PMB-RW, pihak kecamatan sudah menginformasikan kepada kelurahan dan LKM-RW, kalau jaringan kerja itu tergantung kesepakatan dari masyarakat yang mendapatkan pembangunan fisik. Kalau kegiatan pelatihan

b. Koordinasi

Koordinasi tersebut yaitu suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir koordinasi sudah dilaksanakan dengan matang. Sudah menginformasikan kepada masyarakat, akan tetapi ada kendala dari realisasi anggaran, berikut hasil wawancara dengan Camat dan Kasi PMK Kecamatan Rumbai Pesisir:

“koordinasi dilakukan untuk

mengetahui bahwa Program PMB-RW berlangsung baik atau tidak dan mempunyai tanggung jawab dari yang diberikan. Pada Program PMB-RW ini memiliki organisasi pelaksana yaitu dari Tim koordinasi Kota dan Tim Koordinasi Kecamatan”.(Hasil wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir, 14 Juli 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik, dari rapat yang dilaksanakan tingkat kota Pekanbaru, lalu tingkat Camat, terus turun ke Kelurahan dan LKM-RW. Tapi tetap saja pelaksanaan kegiatan membutuhkan dana. Dana tersebut direalisasikan pada akhir tahun, dan anggarannya juga terbatas.

c. Komunikasi

Suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang kelompok organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Berikut hasil wawancara penulis bersama masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir:

“komunikasi dalam program PMB-RW berjalan dengan baik, dari Sosialisasi RW dan Pelatihan yang berlangsung. Pengajarannya sangat dimenerti. Kalau

untuk komunikasi saya rasa bagus-bagus saja”.(Hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa komunikasi sudah berlangsung dengan baik, dari perencanaan sampai ke pelaksanaannya.

4. Keadilan

Kesamaan hak sebagai warga Negara untuk mendapatkan dan menjalankan kehidupan yang layak serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti masyarakat pada umumnya. Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu program yang merujuk pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki cakupan yang lebih kecil,

Pada faktor keadilan ini, memiliki beberapa sub-indikator yaitu:

a. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama.

Pada sub-indikator ini penulis mewawancarai bagaimana pendapat dari Camat selaku penanggung jawab dalam Pelaksanaan Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir:

“Pendapat saya mengenai keadilan legal yaitu sesuai dengan disetujuinya dan dikeluarkan peraturan mengenai PMB-RW. Sudah jelas dasar hukum pada Program PMB-RW ini. dan tujuan dari program juga

saya rasa baik, untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya. Jadi semua masyarakat boleh berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan”.(Hasil wawancara dengan Camat Rumbai Pesisir, 14 Juli 2017)

Dari hasil wawancara penulis bersama Camat Rumbai Pesisir, dapat dianalisis bahwa Program PMB-RW di Kota Pekanbaru sudah jelas dasar hukumnya.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan ini yaitu menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan bersama RW dan Ibu Posyandu selaku masyarakat

“kami tidak mempunyai posyandu yang permanen, seharusnya lebih di prioritaskan pembangunan Posyandu di RW kami”.(Hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, 23 Mei 2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa adanya ketidakadilan terhadap kegiatan ataupun pembangunan pada Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir. Dari dokumentasi tersebut menurut penulis posyandu yang berada di RW 12 Kelurahan Lembah Sari

tersebut tidak layak, karena bertepatan di pinggir jalan besar dan tidak berding,

B. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

1. Dana

Sangat minim nya dana yang di realisasikan Pemerintah Kota sehingga Program berjalan tidak merata. Dalam program PMB-RW memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik.

2. Tenaga

Tenaga pendamping sangat mempengaruhi keberhasilan Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir. Tenaga pendamping yang dipilih dari kalangan sarja akan membuat Program yang dilakukan menjadi program yang berkualitas yang akan meningkatkan sub-indikator pada indikator pertama yaitu ekonomi, sosial, dan intelektual.

3. Pikiran/ Ide

Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dipikiran. Pada faktor ini yaitu membawa dampak yang berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran dari masyarakat, tenaga pendamping ataupun tokoh masyarakat dan lain-lainnya.

4. Keadilan

Pada faktor ini sangatlah penting. Karena sebaiknya dalam Program PMB-RW di Kecamatan Rumbai Pesisir berjalan sesuai yang membutuhkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir belum bisa meningkatkan ekonomi, sosial, masyarakat, akan tetapi pengetahuan masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah didapatkan dalam Program PMB-RW. Partisipasi dari tenaga pendamping sudah berjalan dan memiliki manfaat bagi berjalannya Program PMB-RW dalam perencanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat untuk ide kegiatan sudah berjalan melalui musyawarah jaringan kerja berupa informasi, koordinasi, dan komunikasi. Akan tetapi partisipasi dana masih terbatas yang dikeluarkan Pemerintah Kota sehingga kegiatan yang direncanakan tidak bisa berjalan semua.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu Partisipasi berbentuk dana dan tenaga/ide berupa gagasan serta keadilan. Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan sehingga partisipasi tenaga pendamping dan ide gagasan berjalan sesuai keinginan masyarakat. Sehingga berlangsungnya keadilan dalam Program PMB-RW.

Saran

1. Tenaga pendamping menurut saya harus sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, misalkan untuk budi daya perikanan yaitu dari sarjana perikanan, dan perbengkelan dari sarjana teknik. Sehingga kegiatan berjalan dengan baik
2. Pemerintah kota sebaiknya mengeluarkan anggaran dana yang besar agar kegiatan yang sudah direncanakan terlaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Program PMB-RW yaitu peningkatan ekonomi, sosial dan intelektual masyarakat yang mengikuti pelatihan Program PMB-RW tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar dan Tarigan, Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik
- Amalia, Imanda. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelurahan Siaga di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aprilia, Theresia, dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta. Bandung.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Negara dan Perempuan*. Graha Guru dan Media Wacana. Yogyakarta
- Cheema, G Shabbir & Rondinelli, Dennis A, 1983, “Decentralization and Development”, Sage Publication, Inc.
- Frank Teroriero, Jim IFE. 2006. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Grindle, Merilee S. (ed). 1980. *Politics and Policy Impelementations in the Third World*. New Jersey. Princeton University Press.
- Halim, AS, Khambali, I, Basyid. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren. Yogyakarta.
- Jones, Charles O. 1994, *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto*, Jakarta: Roja Grafindo Persada
- M.M, Zulkarnain. 2010. *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta. Adicita Karyanusa
- Mardikanto, Totok. Dan Poerwoko Soebito. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung